

PERSPEKTIF MASYARAKAT: PENGARUH PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA ORGANISASI (DISPENDUKCAPIL KABUPATEN MAGETAN)

Erwing Wahyu Millensyah

Administrasi Publik, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2025

Revised Januari, 2025

Accepted Januari, 2025

Available Januari, 2025

erwing.wahyu.fisip@upnjatim.ac.id

Kata Kunci:

Etika Administrasi Publik, Pelayanan Reformasi, Birokrasi, Korupsi,

Keywords:

Public Administration Ethics, Reform, Bureaucracy, Corruption,



Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan tujuan menganalisis pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja organisasi. Penelitian kuantitatif ini menggunakan variabel Prinsip-prinsip *Good Governance* (X) dan Kinerja Organisasi (Y). Populasi penelitian adalah masyarakat berusia di atas 17 tahun yang mengurus dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan selama Oktober-Desember 2021. Sampel terdiri dari 238 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa Prinsip-prinsip *Good Governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Organisasi, dengan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$) dan t hitung sebesar 17,359 (lebih besar dari t tabel 1,651). Saran penelitian meliputi menyelenggarakan forum diskusi elektronik yang terjadwal, agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan

meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melalui perbaikan manajemen sumber daya manusia seperti pelatihan, workshop, dan pengembangan komitmen kerja.

Kata kunci: *Good Governance; Kinerja Organisasi; Manajemen Publik.*

1. Pendahuluan

Good governance menjadi kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, berperan menciptakan keseimbangan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kepercayaan publik. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi sektor publik.

Good governance merupakan pengelolaan kekuasaan berbasis hukum, transparansi, dan pertanggungjawaban. Konsep ini menuntut instansi pemerintah untuk responsif terhadap tuntutan masyarakat, memberikan pelayanan publik berkualitas, serta mendorong terciptanya tata kelola demokratis. Dalam pelayanan publik, prinsip *good governance* juga menjadi alat ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.

Kinerja organisasi dipahami sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kumorotomo (1995), kinerja dapat diukur melalui indikator seperti efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap. Dalam konteks pelayanan publik, indikator ini sangat penting untuk memastikan pelayanan yang adil, transparan, dan berkualitas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk menciptakan *good governance*, instansi ini dituntut memiliki kinerja yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Standar Pelayanan Minimum (SPM) mengacu pada PERMEN PAN & RB Nomor 15

Tahun 2014, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2021, Dinas ini memperoleh nilai 86,17 dengan mutu pelayanan "Baik," namun tetap diharapkan ada peningkatan.

Beberapa kendala dalam pelayanan di antaranya adalah ketidaksinkronan data pada dokumen, seperti KTP dan KK, serta keterbatasan sistem pelayanan online berbasis WhatsApp (PAKTUWA) yang menyulitkan warga lanjut usia. Oleh karena itu, kinerja organisasi perlu dievaluasi berdasarkan efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas proses pelayanan yang mendukung pencapaian tujuan, yaitu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi publik.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan kinerja organisasi publik. Penelitian Purba (2021) pada Kantor Kepala Desa Surbakti, Kabupaten Karo, mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* berdampak signifikan terhadap kinerja organisasi. Penelitian oleh Nur Azlina dan Ira Amelia (2014) di Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang dan temuan-temuan tersebut menjadi landasan penting untuk mengkaji pengaruh antara prinsip-prinsip *good governance* dan kinerja organisasi di Dispendukcapil Kabupaten Magetan, penelitian dengan judul "Perspektif Masyarakat: Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Governance* terhadap Kinerja Organisasi (Dispendukcapil Kabupaten Magetan)" dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan tersebut secara lebih mendalam.

2. Tinjauan Pustaka

A. *Good Governance*

Good Governance berasal dari bahasa Latin gubernare, yang berarti mengemudi, mengarahkan, atau mengendalikan, dan kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Inggris menjadi govern, yang memiliki makna serupa, yaitu steer (mengemudi), direct (mengarahkan), dan rule (memerintah). Dalam bahasa Inggris, istilah ini sering digunakan dengan arti "memerintah dengan kewenangan" (rule with authority). Menurut Mardiasmo (1998), *good governance* adalah konsep pendekatan yang berfokus pada pembangunan sektor publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan *good governance* sebagai manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dan kokoh, sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien. Hal ini mencakup penghindaran alokasi sumber daya dan investasi yang tidak tepat, pencegahan korupsi administratif maupun politik, penerapan disiplin anggaran, dan pengembangan kerangka hukum serta politik yang mendukung aktivitas kewirausahaan (Wahab, 2002). Selain itu, Bank Dunia juga menekankan bahwa *good governance* adalah hubungan yang saling mendukung antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (Effendi, 1996). Mardiasmo (dalam Tangkilisan, 2005) menambahkan bahwa orientasi pembangunan di sektor publik bertujuan untuk mewujudkan *good governance*, yang pada dasarnya berarti pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan pembangunan secara bertanggung jawab, dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, efisiensi, dan pencegahan korupsi baik dalam aspek administratif maupun politik.

Prinsip-prinsip *Good Governance* berdasarkan dokumen United Nations Development Program (UNDP, 1999) terdiri dari sembilan poin utama:

1. Partisipasi: Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dengan menjunjung

kebebasan berpendapat dan beraspirasi. Partisipasi ini bertujuan untuk mendorong pembangunan yang inklusif.

2. **Aturan Hukum (*Rule of Law*):** Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten, terutama yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. **Transparansi:** Proses dan informasi kelembagaan harus terbuka, mudah diakses, dan disajikan secara jelas agar dapat digunakan untuk evaluasi dan pengawasan oleh masyarakat.
4. **Daya Tanggap (*Responsiveness*):** Institusi dan proses pemerintahan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
5. **Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*):** Pemerintahan bertindak sebagai mediator untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda guna mencapai kesepakatan terbaik dalam kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
6. **Berkeadilan (*Equity*):** *Good governance* memastikan kesempatan yang setara bagi semua individu, tanpa diskriminasi, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
7. **Efektivitas dan Efisiensi:** Pemerintahan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8. **Akuntabilitas:** Pejabat publik harus bertanggung jawab atas kinerja dan program yang mereka jalankan kepada masyarakat.
9. **Visi Strategis:** Pemerintahan yang baik memiliki visi jangka panjang yang komprehensif dan memahami aspek sejarah, budaya, serta kompleksitas sosial untuk mendukung pembangunan.

Menurut Sedarmayanti (2013), terdapat empat prinsip utama dalam *good governance*:

1. **Akuntabilitas:** Kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas organisasi dengan memperhatikan etika dan prinsip administrasi yang benar.
2. **Transparansi:** Keterbukaan dalam menyediakan informasi yang dapat dipahami masyarakat.
3. **Partisipasi:** Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menjaga tata tertib.
4. **Aturan Hukum:** Jaminan kepastian hukum dan keadilan, termasuk penerapan prosedur operasional yang jelas serta sistem penghargaan dan sanksi.

B. Kinerja Organisasi

Kinerja adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata dasar "kerja" dan merupakan terjemahan dari istilah asing yang bermakna prestasi atau hasil kerja. Dalam konteks organisasi, kinerja mengacu pada sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Menurut Surjadi (2009), kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang diraih oleh suatu organisasi, yang mencerminkan keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, kinerja organisasi dapat diukur dari sejauh mana pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Konsep kinerja (*performance*) didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau tingkat keberhasilan (*degree of accomplishment*), sebagaimana dijelaskan oleh Rue dan Byars (1981 dalam Keban, 1995). Artinya, kinerja organisasi dapat dinilai berdasarkan kemampuan organisasi untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Karena kinerja organisasi bertujuan untuk mewujudkan sasaran tertentu, informasi terkait kinerja menjadi elemen yang sangat penting. Informasi mengenai kinerja organisasi berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menentukan apakah proses kerja yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun, pada kenyataannya, masih banyak organisasi yang kurang memiliki, atau bahkan sama sekali tidak memiliki, informasi yang memadai tentang kinerja internal mereka.

Penilaian kinerja organisasi memerlukan indikator atau kriteria yang jelas untuk mengukur dan menentukan efektivitasnya. Tanpa adanya kriteria tersebut, organisasi akan kesulitan dalam membandingkan alternatif alokasi sumber daya, desain organisasi, serta distribusi tugas dan wewenang. Kumorotomo (1995) mengidentifikasi empat kriteria utama dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik:

1. Efisiensi: Mengukur sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan rasional dari sudut pandang ekonomi.
2. Efektivitas: Menilai apakah tujuan utama pendirian organisasi pelayanan publik telah tercapai, dengan mempertimbangkan rasionalitas teknis, nilai-nilai, misi, dan fungsi organisasi sebagai agen pembangunan.
3. Keadilan: Menjamin bahwa distribusi layanan publik dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau hubungan kekerabatan.
4. Daya Tanggap: Mengukur kemampuan organisasi dalam merespons kebutuhan vital masyarakat dengan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja organisasi dipengaruhi oleh kualitas faktor input dan proses manajemen. Oleh karena itu, peningkatan kinerja harus melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas kedua aspek tersebut. Fokus peningkatan, baik pada sisi internal maupun eksternal organisasi, akan bergantung pada masalah spesifik yang dihadapi oleh organisasi.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode survei eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Variabel independen (X) adalah Prinsip-prinsip *good governance* dengan indikator akuntabilitas, transparansi, partisipasi, aturan hukum (Sedarmayanti, 2013), sedangkan variabel dependen (Y) adalah kinerja organisasi dengan indikator efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap (Kumorotomo, 1995). Sampel penelitian terdiri atas masyarakat yang pernah mengurus dokumen di Dinas tersebut pada periode Oktober hingga Desember 2021, berusia di atas 17 tahun, dengan jumlah sampel sebanyak 238 orang, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer (kuesioner dan observasi) serta data sekunder (kajian pustaka dan dokumentasi). Data melalui uji prasyarat analisis seperti uji validitas dan uji reliabilitas, serta melalui uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji linieritas, dan uji heterokedastisitas. Analisis data menggunakan regresi linier sederhana dengan alat uji statistik SPSS versi 25.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka untuk variabel Prinsip-prinsip *good governance* (X) terdiri dari empat indikator, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan aturan hukum, yang kemudian diuraikan menjadi delapan item. Item dengan nilai tertinggi pada variabel ini adalah "Partisipasi dalam menjaga tata tertib baik pegawai/masyarakat", yang termasuk dalam indikator partisipasi, dengan nilai 3,29, yang berada pada kategori sangat tinggi. Sebaliknya, nilai terendah terdapat pada item "Partisipasi masyarakat dalam beraspirasi" yang terletak pada indikator partisipasi dengan nilai sebesar 3,14 yang dimana berkategori tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka untuk variabel Kinerja Organisasi (Y) terdiri dari empat indikator, yaitu efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap, yang dijabarkan menjadi delapan item. Item dengan nilai tertinggi pada variabel ini adalah "Adanya efisiensi biaya terhadap pengajuan pelayanan", yang termasuk dalam indikator efisiensi, dengan nilai 3,29, yang berada pada kategori sangat tinggi. Sementara itu, nilai

terendah terdapat pada item "Adanya pelayanan yang sesuai sasaran", yang termasuk dalam indikator daya tanggap, dengan nilai 3,12 yang tergolong tinggi.

1. Uji Validitas

Correlations		
Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>		
	Pearson Correlation	Sig. (2- tailed)
GG1	.483	.000
GG2	.646	.000
GG3	.527	.000
GG4	.644	.000
GG5	.621	.000
GG6	.700	.000
GG7	.666	.000
GG8	.623	.000
GG9	.537	.000
GG10	.597	.000
GG11	.482	.000
GG12	.537	.000
Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	1	

Tabel 1. Uji Validitas Variabel Prinsip-prinsip *Good Governance* (X)

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa variabel Prinsip-prinsip *Good Governance* yang memiliki 12 items menghasilkan nilai r hitung $> r$ tabel yaitu 0,128 dan nilai signifikansi $< 0,05$ untuk $n=247$ dan $\alpha= 5\%$ atau 0,05 sehingga kuesioner yang disebarakan dapat dikatakan valid.

Correlations		
	Pearson Correlation	Sig. (2- tailed)
KO1	.491	.000
KO2	.608	.000
KO3	.701	.000
KO4	.701	.000
KO5	.654	.000
KO6	.624	.000
KO7	.710	.000
KO8	.730	.000
KO9	.613	.000
KO10	.678	.000
KO11	.694	.000
KO12	.490	.000
Kinerja Organisasi	1	

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Kinerja Organisasi (Y)

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa variabel Kinerja Organisasi yang memiliki 12 items menghasilkan nilai r hitung $> r$ tabel yaitu 0,128 dan nilai signifikansi $< 0,05$ untuk $n=247$ dan $\alpha= 5\%$ atau 0,05 sehingga kuesioner yang disebarakan dapat dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,831	12

Tabel 3. Uji Reliabilitas Variabel Prinsip-prinsip *Good Governance* (X)

Sumber: Olahan peneliti.

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai dari hasil uji reliabilitas adalah memiliki cronbach alpha sebesar 0,831 yang dimana lebih besar dari 0,6 sehingga seluruh item pada variabel Prinsip-prinsip *Good Governance* dapat dikatakan reliabel.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,869	12

Tabel 4. Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Organisasi (Y)

Sumber: Olahan peneliti.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai dari hasil uji reliabilitas adalah memiliki cronbach alpha sebesar 0,869 yang dimana lebih besar dari 0,6 sehingga seluruh items pada variabel Kinerja Organisasi dapat dikatakan reliabel.

3. Uji Normalitas

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	Kinerja Organisasi
N		274	274
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	39,0073	39,0730
	Std. Deviation	4,57417	4,94236
Most Extreme Differences	Absolute	,107	,139
	Positive	,096	,090
	Negative	-,107	-,139
Kolmogorov-Smirnov Z		1,764	2,306
Asymp. Sig. (2-tailed)		,067	,069

Tabel 5. Uji Normalitas

Sumber: Olahan peneliti.

Berdasarkan hasil pada tabel 5 di atas pengujian terhadap unstandardized residual menghasilkan asymp. sig. lebih besar dari 0,05 yakni menunjukkan hasil 0,67 untuk variabel Prinsip-prinsip *Good Governance* (X) dan 0,69 untuk variabel Kinerja Organisasi (Y), yang dimana hal ini sudah sesuai dengan kaidah pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4. Uji Linieritas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kinerja Organisasi *	Between	(Combined)	4441,449	23	193,106	21,677	,000
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance	Groups	Linearity	4162,117	1	4162,117	467,215	,000
		Deviation from Linearity	279,332	22	12,697	1,425	,102
	Within Groups		2227,091	250	8,908		
	Total		6668,540	273			

Tabel 6. Uji Linieritas

Sumber: Olahan peneliti.

Berdasarkan tabel 6 hasil uji linieritas di atas, semua variabel memiliki nilai signifikansi Linierity sebesar 0,00 yang dimana lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel penelitian dapat dikatakan linier.

5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,128	1,086		1,960	,051
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance	,002	,028	,004	,061	,951

a. Dependent Variable: RES2

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Olahan peneliti.

Berdasarkan data pada tabel 7, nilai signifikansi (sig.) untuk variabel pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* (X) adalah 0,951, yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan kriteria uji gejser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

6. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary		
R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.561	.559	3.14980

a. Predictors: (Constant), Penerapan Prinsip-prinsip Good

Governance

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Sumber: Olahan peneliti.

Berdasarkan tabel 8 diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,561 yang menunjukkan bahwa sebesar 56,1% kinerja organisasi dipengaruhi oleh variabel independennya (prinsip-prinsip *good governance*) sisanya 43,9% dipengaruhi oleh faktor yang lain di luar variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

7. Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,275	1,808		4,024	,000
Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance	,811	,047	,749	17,359	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Organisasi

Tabel 9. Tabel Uji t

Sumber: Olahan peneliti

Berdasarkan hasil dari perhitungan penelitian ini menggunakan uji regresi linier sederhana yang memiliki tujuan untuk mengetahui besar pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebas yakni diketahui bahwa:

1. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,561 yang menunjukkan besar pengaruh variabel pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja organisasi sebesar 56,1%.
2. Nilai T hitung > T tabel ($17,359 > 1,651$) dan nilai $p < \alpha$ ($0,000 < 0,05$).

Berdasarkan hasil tersebut dikatakan bahwa variabel prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi (Nilai Thitung lebih besar dari T tabel dan nilai p lebih kecil dari 0,05). Hal ini memiliki arti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja organisasi dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2) yakni sebesar 0,561 atau sebesar 56,1% sedangkan sisanya sebesar 43,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana pada penelitian ini, diperoleh persamaan regresi:

$$Y = a + bX \text{ jadi } Y = 7,275 + 0,811X$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 7,275 menunjukkan bahwa nilai tetap variabel Y (kinerja pegawai) adalah 7,275 ketika variabel X (pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*) bernilai nol.
- b. Koefisien regresi variabel X sebesar 0,811 berarti setiap peningkatan 1 unit pada variabel X, nilai variabel Y akan bertambah sebesar 0,811. Koefisien ini bernilai positif, sehingga hubungan antara X dan Y bersifat positif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Perspektif Masyarakat: Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Governance* terhadap Kinerja Organisasi (Dispendukcapil Kabupaten Magetan)” menggunakan analisis regresi linier sederhana maka



dihasilkan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja organisasi.

Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dapat dikatakan memiliki pengaruh yang sebesar 56,1% yang dimana sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, nilai rata-rata terendah untuk perspektif masyarakat terdapat pada variabel Prinsip-prinsip *Good Governance* (X), pada item "Melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan" yang termasuk dalam indikator partisipasi, dengan nilai rata-rata sebesar 3,14. Saran yang dapat diberikan adalah dengan menyelenggarakan forum diskusi elektronik yang terjadwal, agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan. Nilai terendah pada variabel Kinerja Organisasi (Y) ditemukan pada item "Adanya pelayanan yang sesuai sasaran" yang termasuk dalam indikator efektivitas, dengan nilai rata-rata sebesar 3,12. Saran yang dapat diberikan adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melalui perbaikan manajemen sumber daya manusia seperti pelatihan, workshop, dan pengembangan komitmen kerja.

Daftar Referensi

- Amalia, Ira dan Nur Azlina. *Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. 2014
- Keban, Yermias T. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UGM. 1995
- Kumorotomo. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPPAM. 1995
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. 2009
- Purba, L. T. *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kinerja Organisasi (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Subakti, Kabupaten Karo)*. Skripsi. Universitas HKBP Nommensen Medan). 2021
- Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (5th ed.)*. PT Refika Aditama, Bandung. 2011
- Surjadi. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT Rafika ADITAMA. 2009
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grassindo. 2005
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- United Nations Development Programme. 'Decentralization: A Sampling of Definitions', *Joint UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local Governance*. 1999
- Yuanida, & Meitika. *Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal akuntansi dan bisnis ekonomi. 2010